

Podcast Sebagai Media Literasi Hukum: Analisis Podcast Sebagai Media Dalam Memahami Nilai-Nilai Bela Negara Oleh Generasi Muda di Indonesia

Eirene Eva Marta Sheila, Fatma Putri Fadilah, Maria Sylvia Putri, Muhammad Hanan Nuhi, Javier Artarindo Jeconia Hia, Halim Manullang, Bona J. Tampubolon, Christmas Petra Keppy, Nabilah Puspitarini

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 15, 2025

Revised May 23, 2025

Accepted May 28, 2025

Available online June 08, 2025

Keywords

Legal literacy; podcast; national defense; young generation; digital media



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Dalam era digital saat ini, literasi hukum di kalangan generasi muda masih tergolong rendah, meskipun akses terhadap media digital semakin luas. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana podcast berperan sebagai media literasi hukum yang efektif dalam membangun pemahaman nilai-nilai bela negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis konten. Sumber data diambil dari tayangan podcast pada kanal YouTube Endgame yang menampilkan Prof. Mahfud MD sebagai narasumber. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode simak-catat untuk mengidentifikasi pesan-pesan hukum dan kebangsaan yang disampaikan dalam podcast tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa podcast mampu menyampaikan isu-isu hukum dan kebangsaan dengan gaya komunikasi yang santai namun substansial, sehingga mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan generasi muda. Podcast juga mendorong audiens untuk bersikap kritis, partisipatif, dan memiliki kepedulian terhadap keadilan sosial serta supremasi hukum. Dengan demikian, podcast berpotensi menjadi media alternatif dalam membangun literasi hukum dan memperkuat kesadaran bela negara di era digital.

ABSTRAK

In today's digital era, legal literacy among young people remains relatively low, despite the increasing accessibility of digital media. This article aims to analyze how podcasts can serve as an effective medium for legal literacy, particularly in promoting awareness of national defense values. This study adopts a qualitative method with a content analysis approach. The data source is taken from the podcast episode on the Endgame YouTube channel featuring Prof. Mahfud MD as a guest speaker. Data collection was conducted through a listening and note-taking technique to identify key legal and national messages conveyed in the podcast. The results show that podcasts are capable of delivering legal and national issues with a casual yet substantial communication style, making the content more accessible and relevant to young audiences. Moreover, podcasts encourage listeners to think critically, participate actively, and foster a sense of justice and legal awareness. Therefore, podcasts have the potential to serve as alternative media for enhancing legal literacy and strengthening national defense consciousness in the digital era.

PENDAHULUAN

Keberlangsungan negara hukum bergantung pada legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi-institusi penegak hukum. Dalam konteks Indonesia kontemporer, relasi antara hukum dan kekuasaan politik kerap menimbulkan kekecewaan. Hukum yang idealnya berfungsi sebagai penjamin keadilan justru sering dipersepsikan sebagai instrumen kekuasaan, bukan pengontrolnya. Ketika proses legislasi, penegakan hukum, maupun putusan peradilan menunjukkan kecenderungan tunduk pada kepentingan politik, maka kredibilitas sistem hukum turut dipertaruhkan.¹ Tokoh publik seperti Prof. Mahfud MD bahkan secara terbuka mengkritisi kondisi ini dengan menyatakan bahwa "hukum adalah produk politik." Pernyataan tersebut menyoroti bagaimana hukum di Indonesia belum sepenuhnya

¹ Vedi Hadiz yang membahas hubungan kompleks antara kekuasaan politik dan institusi hukum di Indonesia dalam karyanya Hadiz, V. R. (2004). Decentralisation and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives. *Development and Change*, 35(4), 697-718.

*Corresponding Author

Email: ¹2210611176@mahasiswa.upnvj.ac.id, ²2210611198@mahasiswa.upnvj.ac.id, ³2210611200@mahasiswa.upnvj.ac.id,

⁴2210611206@mahasiswa.upnvj.ac.id, ⁵2210611243@mahasiswa.upnvj.ac.id, ⁶2210611247@mahasiswa.upnvj.ac.id,

⁷2210611260@mahasiswa.upnvj.ac.id, ⁸2210611265@mahasiswa.upnvj.ac.id, ⁹2210611267@mahasiswa.upnvj.ac.id

mampu berdiri independen, dan bagaimana krisis kepercayaan terhadap hukum menjadi refleksi dari ketimpangan antara norma ideal dan praktik nyata dalam demokrasi.²

Dalam situasi tersebut, generasi muda sebagai kelompok mayoritas dalam struktur demografi Indonesia memegang peranan penting. Mereka tumbuh dalam ekosistem digital yang sarat akan informasi, namun belum tentu dibarengi dengan literasi hukum dan politik yang memadai. Sementara partisipasi mereka dalam ruang publik digital semakin meningkat, pemahaman kritis terhadap konsep-konsep seperti politik hukum dan bela negara justru belum merata. Di sinilah muncul kesenjangan antara tingginya eksposur terhadap isu hukum dan politik di satu sisi, dan rendahnya kedalaman pemahaman substantif di sisi lain. Dalam konteks ini, cara generasi muda memahami hukum sangat dipengaruhi oleh media dan narasi yang mereka konsumsi. Bagi sebagian dari mereka, hukum diposisikan sebagai sarana keadilan, sementara bagi yang lain, hukum lebih dilihat sebagai alat legitimasi kekuasaan.³

Di tengah berkembangnya teknologi informasi, media digital menjadi arena baru pembentukan opini publik dan penyebaran wacana hukum-politik. Generasi muda kini tidak lagi bergantung pada media arus utama atau jalur pendidikan formal untuk memahami isu-isu kebangsaan. Platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan podcast menjadi sumber informasi alternatif yang sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi hukum dan negara. Di satu sisi, ini menunjukkan demokratisasi informasi dan perluasan partisipasi. Namun, di sisi lain, banjir informasi juga menyisakan tantangan besar, terutama dalam hal memilah antara wacana yang informatif dengan yang manipulatif. Kondisi ini menegaskan pentingnya literasi digital dan kemampuan berpikir kritis agar konten hukum dapat dibaca secara lebih tajam dan kontekstual.⁴

Salah satu bentuk media yang semakin populer di kalangan generasi muda adalah podcast, khususnya yang hadir di platform YouTube dan Spotify. Formatnya yang fleksibel, naratif, dan berbasis percakapan membuat topik-topik kompleks seperti hukum menjadi lebih mudah diakses dan terasa relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, podcast dapat berfungsi sebagai media alternatif untuk menyampaikan isu-isu penting terkait politik hukum dan bela negara. Artikel ini akan secara khusus menganalisis salah satu tayangan podcast bertema hukum-politik yang melibatkan Prof. Mahfud MD dalam program *Endgame* bersama Gita Wirjawan. Tayangan tersebut menampilkan diskusi mendalam tentang relasi antara hukum dan kekuasaan serta refleksi atas kondisi penegakan hukum di Indonesia. Melalui analisis terhadap konten dan narasi tayangan tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji bagaimana nilai-nilai bela negara dan kesadaran politik hukum dikomunikasikan kepada generasi muda melalui media digital.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana generasi muda memaknai isi tayangan semacam ini apakah mereka hanya menjadi konsumen pasif, atau justru dapat mengembangkan sikap kritis terhadap relasi antara hukum dan kekuasaan yang dibahas? Tayangan podcast yang menghadirkan narasi tentang politik hukum dan kritik terhadap kondisi hukum di Indonesia memerlukan daya tangkap yang tidak hanya informatif, tetapi juga reflektif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana pesan-pesan yang disampaikan dalam podcast tersebut benar-benar dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya supremasi hukum dan semangat bela negara di kalangan audiens muda. Dari sinilah rumusan masalah utama dalam artikel ini dirumuskan: *Bagaimana narasi politik hukum dan nilai-nilai bela negara dikonstruksi dan disampaikan melalui podcast hukum digital kepada generasi muda?*

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis isi narasi dalam tayangan podcast hukum sebagai bentuk komunikasi politik hukum sekaligus media internalisasi nilai-nilai bela negara. Dengan mengambil studi kasus tayangan *Endgame* bersama Prof. Mahfud MD, penelitian ini akan menyoroti bagaimana konsep hukum, kekuasaan, dan kebangsaan dikemas dalam media populer, serta bagaimana kemungkinan dampaknya terhadap pola pikir generasi muda. Tujuan lain yang ingin dicapai adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana format podcast mampu menjembatani kesenjangan pemahaman antara generasi muda dengan isu-isu kenegaraan yang selama ini dianggap berat, kaku, atau jauh dari realitas mereka.

² Diskusi mengenai pengaruh politik terhadap hukum dan peradilan di Indonesia telah banyak dibahas, salah satunya dalam Lindsey, T. (Ed.). (2008). *Indonesia, Law and Society* (2nd ed.). Federation Press.

³ Penelitian mengenai literasi digital dan partisipasi politik generasi muda di era digital relevan dengan konteks ini. Sebagai contoh, lihat Lim, M. (2013). Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 43 (4), 636-657.

⁴ Studi mengenai peran media baru dalam pembentukan opini publik muda dapat dilihat pada Tapsell, R. (2017). *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution*. Rowman & Littlefield.

Penelitian mengenai literasi hukum, kepercayaan publik terhadap institusi hukum, serta media digital sebagai alat edukasi telah cukup banyak dilakukan dalam berbagai disiplin ilmu. Kajian-kajian sebelumnya umumnya menyoroti rendahnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, serta pentingnya literasi hukum sebagai bagian dari pembentukan warga negara yang kritis dan bertanggung jawab. Di sisi lain, beberapa penelitian juga menyoroti peran media baru seperti podcast dan YouTube dalam membentuk opini dan perilaku politik generasi digital. Penelitian dari lembaga seperti Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa generasi muda memiliki kesadaran politik yang tinggi, tetapi sering kali tidak diimbangi dengan pemahaman mendalam terhadap mekanisme hukum dan konstitusi. Sementara itu, studi-studi mengenai podcast umumnya berfokus pada aspek teknis media atau tren konsumsi, dan belum banyak yang mengkaji secara spesifik konten hukum-politik dan dampaknya terhadap kesadaran bela negara.

Kesenjangan inilah yang ingin dijembatani melalui artikel ini. Meski ada banyak podcast bertema hukum di ruang digital Indonesia, belum banyak penelitian yang secara kritis menganalisis bagaimana narasi dalam podcast tersebut membentuk persepsi generasi muda terhadap konsep penting seperti politik hukum dan bela negara. Penelitian ini mencoba masuk ke ruang yang belum banyak dieksplorasi yakni melihat podcast tidak hanya sebagai media hiburan atau edukasi teknis, tetapi sebagai ruang diskursif tempat narasi hukum dan negara dinegosiasikan, diperdebatkan, dan diserap oleh publik muda. Dengan menganalisis satu tayangan podcast secara mendalam, artikel ini juga berkontribusi dalam memperkuat pendekatan interdisipliner antara ilmu hukum, ilmu komunikasi, dan pendidikan kewarganegaraan.

Dalam situasi sosial yang ditandai oleh krisis kepercayaan terhadap hukum dan berkembangnya ruang-ruang diskusi digital, penting bagi dunia akademik untuk tidak sekadar menjadi pengamat, tetapi juga turut mengkaji secara kritis dinamika baru tersebut. Media digital, termasuk podcast, tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga membentuk cara berpikir masyarakat terutama generasi muda tentang negara, hukum, dan peran warga negara. Ketika isu-isu hukum dikemas dalam bentuk percakapan santai namun sarat muatan ideologis, maka diperlukan analisis yang mampu menelisik lebih jauh: apakah yang disampaikan mendorong kesadaran kritis, atau justru menyederhanakan kompleksitas hukum demi konsumsi cepat dan dangkal? Ini menjadi relevan mengingat bela negara di era digital bukan hanya soal loyalitas simbolik, tetapi juga soal keberanian berpikir jernih dan bertindak berdasarkan informasi yang benar.⁵

Oleh karena itu, artikel ini penting dilakukan sebagai upaya memahami bagaimana ruang digital memediasi nilai-nilai kebangsaan dan hukum kepada generasi penerus bangsa. Kajian ini tidak hanya menyumbang pada literatur akademik tentang podcast dan politik hukum, tetapi juga menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana bela negara dapat dimaknai ulang dalam konteks budaya digital. Dengan memfokuskan analisis pada satu tayangan podcast bertema politik hukum yang menampilkan tokoh intelektual negara, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa narasi hukum tidaklah netral, dan generasi muda memiliki peran krusial dalam membacanya secara kritis. Dalam konteks inilah, literasi hukum digital menjadi bagian integral dari bela negara itu sendiri.

TINJAUAN LITERATUR

Podcast

Podcast merupakan salah satu bentuk media baru yang menunjukkan pertumbuhan popularitas yang signifikan, khususnya dalam konteks komunikasi digital dan penyiaran modern. Meskipun eksistensinya telah menjadi bagian integral dari lanskap media kontemporer, tidak semua literatur ilmiah, khususnya dalam studi komunikasi, secara eksplisit menguraikan definisi podcast secara komprehensif. Secara umum, podcast dapat dipahami sebagai format konten berbasis audio maupun video yang diproduksi dan disebarluaskan melalui jaringan internet untuk diakses secara *on-demand* oleh khalayak. Dengan kata lain, podcast adalah file digital yang dirancang untuk didengarkan atau ditonton kapan saja oleh pengguna, tanpa bergantung pada jadwal siaran tradisional. Format ini biasanya diunggah ke berbagai platform distribusi daring, memungkinkan pendengar atau penonton untuk berlangganan dan mengakses konten secara berkala. Dari perspektif teknis, podcast merujuk pada

⁵ Relevansi literasi digital untuk partisipasi kewarganegaraan yang kritis dan bela negara di era informasi dibahas dalam berbagai kajian, misalnya, dalam konteks yang lebih luas oleh Hobbs, R. (2010). *Digital and Media Literacy: A Plan of Action*. The Aspen Institute.

sistem distribusi file audio digital, yang memanfaatkan teknologi sindikasi seperti RSS (*Really Simple Syndication*) agar konten dapat diakses secara otomatis oleh pengguna. Sejak kemunculan awalnya pada era 1980-an—yang ditandai oleh perkembangan teknologi rekaman digital dan internet—popularitas podcast telah mengalami peningkatan eksponensial, menjadikannya sebagai medium komunikasi alternatif yang adaptif terhadap kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat global.⁶

Pada masa awal perkembangan media digital, Adam Curry—seorang mantan Video Jockey (VJ) MTV Amerika sekaligus mantan penyiar radio—menyuarakan ketidakpuasannya terhadap keterbatasan variasi konten yang tersedia pada saluran penyiaran konvensional saat itu. Ketidakpuasan tersebut kemudian mendorong Curry untuk berinovasi dalam pengembangan media alternatif. Bersama Dave Winer, seorang *software engineer* yang memiliki keahlian dalam pengembangan teknologi berbasis internet, Curry berhasil merancang sistem distribusi konten digital yang kini dikenal luas sebagai podcast. Kendati demikian, perlu dicatat bahwa istilah *podcast* itu sendiri bukanlah ciptaan Curry maupun Winer. Istilah tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Ben Hammersley, seorang jurnalis asal Amerika Serikat, melalui sebuah artikel yang membahas fenomena baru dalam penyiaran digital. Dalam artikelnya, Hammersley menggabungkan kata *iPod*—yakni perangkat pemutar musik digital milik Apple—dengan istilah *broadcasting*, sehingga melahirkan terminologi *podcast*. Sejak diperkenalkan, istilah ini dengan cepat mendapatkan pengakuan luas di kalangan masyarakat dan akademisi, hingga akhirnya dinobatkan sebagai "Word of the Year" oleh Oxford English Dictionary, menandai pentingnya podcast sebagai fenomena budaya dan media dalam era digital.⁷

Terdapat beberapa jenis podcast, yaitu podcast wawancara, podcast monolog, dan podcast multi-host. Dalam hal ini dapat diakomodir oleh beberapa jenis perangkat untuk podcasting, yaitu audio podcast, enhanced podcast, dan video podcast. Berdasarkan analisis Live 365 (tahun), tidak terdapat standar baku yang mengatur format podcast secara spesifik. Parameter seperti durasi, gaya penyajian, format konten, maupun kualitas produksi menunjukkan variasi yang signifikan. Secara empiris, durasi podcast bervariasi mulai dari beberapa menit hingga beberapa jam, dengan format yang dominan saat ini mengadopsi model dialog antara host dan narasumber. Dari aspek produksi, terdapat disparitas yang cukup besar dalam praktik pembuatan podcast. Di satu sisi, beberapa podcast diproduksi dengan peralatan minimalis dan tanpa proses pascaproduksi, sementara di sisi lain terdapat produksi podcast yang menggunakan fasilitas studio profesional dengan proses editing yang komprehensif, termasuk penambahan elemen pendukung seperti iklan dan musik latar. Diversifikasi konten podcast mencakup spektrum tema yang luas, meliputi namun tidak terbatas pada bidang travel, musik, hiburan, dan olahraga. Sebagai medium dinamis yang terus berevolusi untuk memenuhi kebutuhan audiens, perkembangan podcast tidak hanya terbatas pada format audio konvensional, tetapi telah mengalami ekspansi ke dalam berbagai varian format yang semakin beragam.⁸

Hukum

Penelitian oleh Putri dan Kurniawan menunjukkan bahwa podcast edukatif mampu meningkatkan pemahaman konsep hukum melalui narasi yang kontekstual dan mudah dipahami oleh pendengar awam⁹. Format audio ini dinilai lebih personal dan menarik, terutama jika dipandu oleh narasumber yang ahli dan menggunakan gaya bahasa yang komunikatif. Sementara itu, studi oleh Susanto et al mencatat bahwa podcast dengan tema hukum dan politik telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, sebagai bentuk respons atas meningkatnya literasi kritis masyarakat terhadap isu-isu publik. Podcast juga memberikan ruang diskusi alternatif yang tidak selalu tersedia dalam media arus utama¹⁰.

Dalam konteks pedagogis, podcast juga mendukung pendekatan *constructivist learning*, di mana pendengar aktif membangun pemahaman melalui pengalaman audio dan refleksi pribadi. Model ini sesuai dengan prinsip *self-directed learning*, di mana pendengar memiliki kontrol atas waktu,

⁶ Swastiwi, A. W. (2024). *Globalisasi dan Media: Konvergensi Budaya dan Komunikasi*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.

⁷ Mayangsari, D., & Tiara, D. R. (2019). Podcast sebagai media pembelajaran di era milenial. *Jurnal Golden Age*, 3(02), 126-135.

⁸ Adzani, D. M., & Jumino, J. (2020). Pemanfaatan Podcast dan Instagram Oleh Komunitas Literatif sebagai Media Penyebaran Informasi Bidang Perpustakaan. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 4(3), 327-342.

⁹ Susanto, R., Handayani, D., & Farid, A. (2023). Podcast Politik dan Hukum sebagai Ruang Literasi Digital: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Media Digital Indonesia*, 5(1), 22-35.

¹⁰ Prasetya, A. (2020). Digital Learning dan Peran Podcast dalam Pembelajaran Hukum. *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, 21(2), 66-78.

kecepatan, dan topik pembelajaran yang mereka pilih¹¹. Namun demikian, tantangan utama dalam edukasi hukum berbasis podcast adalah kurasi konten dan validitas materi. Tidak semua podcast memiliki standar akademik yang jelas, sehingga penting adanya verifikasi dari sumber terpercaya atau kolaborasi dengan institusi pendidikan hukum. Selain itu, keterbatasan literasi digital di kalangan masyarakat tertentu juga menjadi hambatan akses yang perlu diperhatikan. Secara keseluruhan, podcast merupakan media edukasi hukum yang potensial, terutama jika dikembangkan secara terstruktur, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan audiens. Kombinasi antara teknologi digital dan pendekatan naratif membuat podcast menjadi instrumen efektif dalam mendekatkan isu-isu hukum kepada publik secara luas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis) sebagai kerangka utama untuk memahami bagaimana pesan-pesan hukum dan nilai-nilai bela negara dikonstruksi dan dikomunikasikan melalui media podcast kepada generasi muda. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada penafsiran makna, narasi, dan dampak simbolik dari tayangan podcast terhadap audiens, bukan pada pengukuran statistik kuantitatif. Objek penelitian dalam kajian ini adalah tayangan podcast dari kanal YouTube Endgame with Gita Wirjawan yang menghadirkan Prof. Mahfud MD sebagai narasumber. Tayangan ini dipilih karena memuat diskusi substansial mengenai relasi antara hukum, kekuasaan, dan kebangsaan, serta mencerminkan upaya penyampaian isu-isu hukum melalui narasi yang akrab dan mudah dipahami oleh publik muda. Beberapa episode lain dari kanal serupa yang relevan dengan tema hukum, keadilan, dan bela negara turut dijadikan referensi pembandingan untuk memperkaya perspektif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode simak dan catat. Peneliti menyimak tayangan podcast secara mendalam, kemudian mencatat bagian-bagian penting yang mengandung unsur naratif tentang hukum, kritik terhadap sistem hukum Indonesia, serta pesan-pesan kebangsaan yang mengarah pada penguatan nilai-nilai bela negara. Data yang dikumpulkan meliputi transkrip dialog, intonasi, gaya bahasa, ekspresi narasumber, hingga konteks sosial dari narasi yang disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Pada bagian ini, peneliti menyajikan hasil analisis terhadap tayangan yang telah dipilih dengan menitikberatkan pada enam aspek utama, yakni aspek kognitif, afektif, konatif, muatan seksualitas, kepatuhan terhadap norma, serta muatan kekerasan. Keenam aspek ini dianalisis untuk memahami bagaimana konten podcast tersebut mempengaruhi cara berpikir, merasakan, dan bertindak dari penontonnya, serta bagaimana podcast itu mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di masyarakat. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah adegan-adegan kunci, dialog, visualisasi, dan narasi dalam tayangan. Aspek kognitif dianalisis untuk melihat sejauh mana podcast mengandung unsur informatif atau edukatif; aspek afektif ditinjau dari emosi yang dibangun atau ditampilkan; sedangkan konatif berkaitan dengan ajakan atau pengaruh terhadap tindakan penonton. Di sisi lain, peneliti juga mengkaji secara kritis sejauh mana podcast menampilkan muatan seksualitas secara eksplisit maupun implisit, tingkat kepatuhan terhadap norma sosial dan hukum, serta intensitas dan bentuk muatan kekerasan yang disajikan. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak potensial podcast terhadap penonton, khususnya dari perspektif komunikasi massa dan etika media.

Judul Episode/Seri/ Sesi/Konten	Aspek Analisis					
	Aspek Penilaian 1 (Kognitif)	Aspek Penilaian 2 (Afektif)	Aspek Penilaian 3 (Konatif)	Aspek Penilaian 4 (Muatan Seksualitas)	Aspek Penilaian 5	Aspek Penilaian 6

¹¹ Siregar, F. M., & Suryani, A. (2023). Validasi konten pembelajaran digital berbasis podcast. *Jurnal Pendidikan Digital Indonesia*, 3(1), 12–22.

					(Kepatuhan terhadap Norma)	(Muatan Kekerasan)
<i>Penegakan Hukum Humanis Lewat Restorative Justice</i>	Video ini memberikan pemahaman mendalam tentang paradigma baru dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya pendekatan <i>Restorative Justice</i> . Penonton diajak memahami pentingnya keadilan yang berorientasi pada pemulihan dan bukan semata-mata pembalasan.	Pemaparan yang disampaikan dengan semangat dan empati oleh Jaksa Agung membangkitkan rasa harapan dan kepercayaan terhadap institusi hukum. Penonton diajak merenungkan pentingnya hati nurani dan nilai-nilai moral dalam menegakkan keadilan, serta bagaimana hukum bisa hadir secara lebih manusiawi di tengah masyarakat.	Video ini menggerakkan penonton, khususnya para Adhyaksa muda, untuk menerapkan prinsip keadilan yang tidak hanya tajam ke bawah, tapi juga ke atas. Ditekankan bahwa jaksa sebagai dominus litis harus bijak dan manusiawi dalam menggunakan kewenangannya.	Tidak terdapat muatan seksual dalam video ini. Seluruh isi berkaitan dengan proses hukum dan kebijakan institusional.	Video ini sangat mematuhi norma sosial dan hukum, serta mempromosikan pendekatan penyelesaian sengketa yang lebih damai, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.	Tidak ada adegan atau deskripsi kekerasan yang eksplisit. Narasi lebih banyak menyoroti solusi atas konflik hukum dan perubahan pendekatan dalam penegakan hukum.
Advokat, Pro Bono dan Akses Keadilan bagi Masyarakat	Video ini memberikan pemahaman mengenai profesi advokat di Indonesia, termasuk perbedaan historis antara advokat dan pengacara yang kini sudah disamakan (merujuk pada UU Advokat No.	Wawancara dengan advokat Jultri Fernando membangkitkan rasa empati terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum namun terkendala akses atau biaya. Pengalaman pribadi	Podcast ini secara implisit mendorong advokat, terutama yang lebih muda atau calon advokat (mahasiswa hukum), untuk tidak ragu mengambil peran dalam kerja pro bono, menekankan	Tidak terdapat muatan seksual dalam video ini. Seluruh isi berfokus pada profesi hukum, bantuan hukum, dan akses keadilan.	Video ini sangat mematuhi norma sosial dan hukum. Konten mempromosikan etika profesi advokat (kewajiban pro bono), akses terhadap keadilan bagi semua lapisan masyarakat, penyelesaian	Tidak ada adegan atau deskripsi kekerasan yang eksplisit. Meskipun menyebutkan jenis kasus seperti sengketa, penggusuran, atau penganiayaan sebagai contoh, fokus utama

	18 Tahun 2003). Dijelaskan pula lingkup kerja advokat (perorangan, badan hukum/perusahaan), peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma (pro bono).	narasumber, yang latar belakang aktivismenya turut mendorong keterlibatannya dalam kerja pro bono, dapat menginspirasi dan menumbuhkan apresiasi terhadap sisi humanis profesi hukum.	manfaat non-finansial seperti pengalaman, jejaring, dan pemenuhan kewajiban profesi.		masalah hukum sesuai prosedur, serta nilai-nilai empati dan kerelawanan dalam membantu sesama.	adalah pada proses penyelesaian hukum dan pemberian bantuan, bukan pada detail kekerasannya
Cerita Mahmud & Kedekatannya dengan Prabowo. Mengapa Pemberantasan Korupsi Dimulai Dari Tom Lembong?	Podcast ini memberikan wawasan seputar dinamika politik dan hukum di Indonesia, khususnya terkait kasus korupsi. Prof. Mahmud MD menjelaskan alasan di balik penetapan Tom Lembong sebagai tersangka, termasuk unsur-unsur hukum yang terpenuhi dalam kasus tersebut. Informasi ini memperkaya pemahaman pendengar tentang proses penegakan	Diskusi yang terjadi dalam podcast tersebut dapat membangkitkan berbagai emosi, seperti keprihatinan terhadap politisasi kasus hukum dan kekhawatiran mengenai keadilan dalam penegakan hukum. Prof. Mahmud MD mengungkapkan pandangannya bahwa kasus Tom Lembong sarat dengan nilai politis, yang mungkin memicu respons	Podcast ini dapat mendorong pendengar untuk lebih kritis dan aktif dalam mengawasi proses penegakan hukum di Indonesia. Dengan memahami potensi politisasi dalam kasus korupsi, pendengar mungkin terdorong untuk berpartisipasi dalam diskusi publik atau mendukung inisiatif yang bertujuan meningkatkan transparansi dan keadilan	Tidak terdapat indikasi adanya muatan seksual dalam podcast ini.	Pembahasan dalam podcast sesuai dengan norma-norma sosial dan hukum yang berlaku. Prof Mahmud MD menyampaikan kritik dan analisisnya dengan cara yang profesional dan sesuai dengan etika komunikasi publik.	Podcast ini tidak mengandung muatan kekerasan. Diskusi berfokus pada analisis politik dan hukum tanpa menyertakan deskripsi atau ajakan untuk melakukan tindakan kekerasan.

	hukum di Indonesia.	emosional dari pendengar.	dalam sistem hukum.			
Korban berjatuh, Pasal Karet UU Tipikor Di-MK-Kan	Podcast ini menyajikan diskusi mendalam mengenai kontroversi Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) di Indonesia. Pembicaraan melibatkan Chandra M. Hamzah, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang membahas bagaimana pasal-pasal tersebut dapat ditafsirkan secara luas, sehingga berpotensi disalahgunakan dalam penegakan hukum	Topik yang diangkat dalam podcast ini dapat membangkitkan berbagai emosi pada pendengar, seperti keprihatinan terhadap potensi ketidakadilan dalam sistem hukum, kekhawatiran mengenai penyalahgunaan wewenang, serta empati terhadap individu yang mungkin menjadi korban dari penerapan pasal-pasal yang dianggap "karet".	Setelah mendengarkan podcast ini, pendengar mungkin terdorong untuk lebih kritis terhadap sistem hukum yang ada dan mempertimbangkan pentingnya reformasi dalam UU Tipikor. Mereka juga dapat termotivasi untuk mendukung inisiatif yang mendorong transparansi dan keadilan dalam penegakan hukum.	Berdasarkan informasi yang tersedia, tidak terdapat indikasi adanya muatan seksual dalam podcast ini.	Podcast ini tampaknya mematuhi norma-norma sosial dan hukum yang berlaku. Diskusi yang disajikan berfokus pada analisis hukum dan tidak mengandung konten yang melanggar etika atau standar moral yang diterima masyarakat.	Tidak ditemukan adanya muatan kekerasan dalam podcast ini. Pembahasan lebih menekankan pada analisis hukum dan kritik terhadap regulasi tanpa mengandung unsur kekerasan.
Hukum Acara Pemeriksaan Terhadap ketentuan Anti Monopoli	Podcast ini membahas penanganan pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Topik yang diangkat dalam podcast ini membangkitkan semangat untuk dapat memahami setiap kasus persaingan usaha dan implementasi dari Undang-	Setelah mendengarkan podcast ini, pendengar mungkin terdorong untuk lebih kritis dalam menilai kinerja lembaga KPPU dan Pengadilan	Berdasarkan informasi yang tersedia, tidak terdapat indikasi adanya muatan seksual dalam podcast ini.	Podcast ini mematuhi norma-norma sosial dan hukum yang berlaku.	Tidak ditemukan adanya muatan kekerasan dalam podcast ini. Pembahasan lebih menekankan pada kompetensi KPPU,

	(KPPU) dan Pengadilan Niaga. Diskusi ini membahas mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	Niaga. Mereka juga dapat menambah wawasan mengenai kasus mengenai persaingan usaha.			prosedur penanganan perkara pelanggaran dimulai dari adanya pelaporan dari pelaku usaha lain dan atas inisiatif KPPU,
Penyitaan Aset dan Penelusuran Transaksi Keuangan Pelaku Tindak Pidana Judi Online	Podcast ini membahas mengenai praktek dilapangan pengungkapan tindak pidana judi online, penyitaan aset dan penelusuran alur transaksi keuangan pelaku tindak pidana masih menemui berbagai kendala.	Topik yang diangkat dalam podcast ini memberikan wawasan mengenai pentingnya penyamaan persepsi secara padu dan utuh untuk mengatasi berbagai kendala dalam penanganan penyitaan aset dan penelusuran alur transaksi keuangan pelaku tindak pidana judi online	Setelah mendengarkan podcast ini, pendengar mungkin terdorong untuk lebih kritis dalam memahami dan mempelajari penyitaan aset dan penelusuran alur transaksi keuangan pelaku tindak pidana judi online, serta mengetahui subjek yang sering melakukan tindak pidana tersebut tidak hanya masyarakat yang berpenghasilan rendah,	Berdasarkan informasi yang tersedia, tidak terdapat indikasi adanya muatan seksual dalam podcast ini.	Podcast ini mematuhi norma-norma sosial dan hukum yang berlaku.	Tidak ditemukan adanya muatan kekerasan dalam podcast ini. Pembahasan lebih menekankan pada praktek dilapangan pengungkapan tindak pidana judi online, penyitaan aset dan penelusuran alur transaksi keuangan pelaku tindak pidana
Guru Honorer Menang, Pemerintah Tdk Menaati Putusan!PMH	Podcast ini memberikan pemahaman hukum tentang apa	Tayangan ini menggugah perasaan tidak adil dan simpati	Podcast ini mengajak penonton untuk lebih peduli	Tidak terdapat unsur seksual dalam bentuk apapun	Podcast ini mendukung norma hukum dan etika publik,	Tidak ada unsur kekerasan seksual, baik dalam

: Pemerintah Melawan Hukum?	itu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh pemerintah, hak hukum guru honorer sebagai warga negara, kekuatan hukum putusan pengadilan dan bagaimana mekanisme hukum administrasi negara	terhadap guru honorer yang telah menang di pengadilan, namun haknya tetap tidak dipenuhi oleh pemerintah. Sehingga penonton dapat ikut merasakan frustrasi terhadap birokrasi dan sistem hukum yang tidak konsisten dan simpati terhadap perjuangan guru honorer.	terhadap hak warga negara, turut mendukung penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan menyuarakan ketidakadilan melalui media hukum atau publik.	dalam tayangan ini. Bahasan murni seputar hukum, keadilan, dan administrasi pemerintahan.	serta mengecam ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan sebagai bentuk pelanggaran norma oleh institusi negara.	bentuk verbal, visual, maupun naratif dalam tayangan ini.
"YANG TERTAWA DAN YANG MENANGIS DI PILKADA. "BANYAK LUBANG HUKUM"	Podcast ini mengupas tuntas dinamika hukum dan politik dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Melalui analisis mendalam, diberikan berbagai celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh aktor politik, mulai dari manipulasi dana kampanye, politik uang, hingga penyalahgun	Episode ini berhasil membangkitkan emosi yang kontras dari pendengarnya. Di satu sisi, muncul gelak tawa ironis menyaksikan kelucuan berbagai taktik kotor yang dilakukan politisi, sementara di sisi lain timbul keprihatinan mendalam melihat rapuhnya sistem hukum yang	Materi podcast ini memiliki potensi besar untuk memicu aksi nyata. Pendengar mungkin terdorong untuk: (1) lebih kritis mengawasi proses Pilkada di daerahnya; (2) aktif melaporkan pelanggaran pemilu melalui kanal resmi; (3) terlibat dalam pendidikan politik masyarakat; serta (4)	Sepanjang analisis terhadap seluruh konten podcast, tidak ditemukan satupun elemen yang mengandung muatan seksual baik secara eksplisit maupun implisit.	Podcast ini secara umum mematuhi norma jurnalistik dan etika komunikasi. Meski membahas isu sensitif, penyampaiannya dilakukan dengan: (1) merujuk pada fakta dan data yang valid; (2) menjaga proporsionalitas kritik; serta (3) tidak melakukan penghinaan pribadi terhadap figur tertentu. Gaya	Analisis konten menunjukkan adanya muatan kekerasan dalam bentuk fisik maupun verbal.

	aan kekuasaan.	seharusnya melindungi proses demokrasi.	mendorong revisi regulasi pemilu yang lebih ketat.		penyampaian Akbar Faisal yang khas tetap dalam koridor analisis politik.	
Fahri Hamzah; MAHFUD MD lebih kayak diadili	Video ini menampilkan diskusi politik yang mendalam, membahas dinamika transisi kekuasaan dari Presiden Jokowi ke Prabowo, serta isu-isu seputar keluarga Jokowi dan tuduhan dinasti politik. Fahri Hamzah mengulas permasalahan dalam tiga perspektif: sejarah, kelembagaan, dan pribadi. Ia menyoroti pentingnya memahami sistem politik secara menyeluruh, bukan hanya menilai individu.	Secara afektif, diskusi berlangsung dengan nada reflektif dan kadang emosional, terutama saat Fahri Hamzah membahas pengalaman pribadinya sebagai pengkritik dan kemudian sebagai pendukung rekonsiliasi. Ada nuansa keprihatinan terhadap konflik elite politik yang berlarut-larut, serta harapan agar transisi kekuasaan berjalan damai dan membawa kebaikan bagi bangsa	Konatif dalam video ini tampak pada dorongan Fahri Hamzah agar elite politik dan masyarakat tidak terjebak pada konflik dan adu domba, melainkan menjaga transisi kekuasaan secara damai dan konstruktif. Ia mengajak untuk introspeksi, memperbaiki sistem, dan mendukung rekonsiliasi demi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.	Video tidak mengandung muatan seksual. Seluruh pembahasan fokus pada isu politik, sejarah, dan tata negara tanpa menyinggung atau menampilkan konten seksual.	Diskusi dilakukan dalam koridor etika dan norma sosial yang berlaku. Kritik disampaikan secara argumentatif dan berbasis data, tanpa menyerang personal secara tidak pantas. Tidak terdapat ujaran kebencian, fitnah, atau pelanggaran norma kesopanan. Pembicaraan juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan transisi kekuasaan yang damai, sesuai nilai-nilai demokrasi.	Video tidak mengandung muatan kekerasan, baik secara verbal maupun visual. Meskipun membahas konflik politik dan sejarah kudeta, narasi yang disampaikan bersifat analitis dan mengedepankan solusi damai. Tidak ada ajakan atau glorifikasi kekerasan.



Gambar 1. Sumber: Podcast Gita Wirjawan

Dengan tayangan yang disajikan oleh pak Gita Wirjawan tersebut wawasan baru yang diberikan kepada masyarakat adalah bagaimana pandangan Narasumber yang pengalamannya sebagai praktisi dan pakar menjadi api bagi masyarakat bahwa dengan kekecewaan beliau dengan hukum yang selalu kalah dengan politik merupakan hal yang salah terjadi di sebuah negara, apalagi negara hukum. Yang dimana hukum merupakan menjadi pedoman, dan hal-hal disekitarnya mengikuti bukan malah sebaiknya, dan yang terjadi di negara kita adalah hukum yang dijadikan alat main untuk berpolitik.



Gambar 2. Sumber Podcast Narasi Newsroom

Dalam tayangan ini membuka cakrawala kita sebagai masyarakat bahwa program yang saat ini menjadi program andalan pemerintah bisa saja menjadi bumerang kepada Indonesia itu sendiri yang bisa mempengaruhi masyarakat itu sendiri, karena dengan banyaknya masalah yang dimiliki dibalik program tersebut, mulai dari skena pendanaan yang tidak jelas, serta sarat atas konflik kepentingan di dalam tubuh Danantara, dan juga narasumber dengan pandangan sebagai pakar ekonom menjelaskan dengan cara yang sangat komprehensif kepada pemirsa. Dan juga narasumber membahas bagaimana dengan tidak matangnya eksekusi program dan maslaah yang tidak bisa diatasi bisa menyebabkan rapuhnya ekonomi Indonesia.

2. Pembahasan

Analisis Terhadap Tayangan Episode Podcast Berkaitan Dengan Hukum Pada Kanal Youtube Gita Wirjawan

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah secara fundamental mengubah lanskap komunikasi dan pola konsumsi informasi oleh masyarakat, terutama kalangan generasi muda yang tumbuh dalam lingkungan serba digital dan cepat. Media digital kini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menjelma sebagai media edukasi, sosialisasi, serta advokasi nilai-nilai sosial-politik yang sebelumnya terbatas pada ruang akademik atau institusi formal. Salah satu bentuk media digital yang mengalami pertumbuhan pesat adalah podcast, yakni platform berbasis audio yang kini telah banyak dipadukan dengan tampilan audio-visual di kanal seperti YouTube yang memberikan ruang diskusi publik dalam format yang lebih luwes dan komunikatif. Melalui podcast, informasi hukum, sosial, bahkan ideologis dapat diakses oleh publik tanpa keterbatasan waktu dan tempat, menjadikan

media ini sebagai instrumen strategis dalam transformasi literasi hukum dan nilai kebangsaan. Dalam konteks masyarakat digital seperti Indonesia, YouTube sebagai platform penyiaran video menjadi sarana utama generasi muda untuk mengakses informasi. Hal ini menunjukkan bahwa media digital telah menjadi salah satu elemen penting dalam membentuk pola pikir, opini, dan bahkan kesadaran hukum serta kewarganegaraan generasi saat ini.

Podcast, yang awalnya dikenal sebagai ruang hiburan dan opini informal, kini mengalami perluasan fungsi menjadi sarana penyebaran wacana-wacana hukum, politik, dan kebangsaan yang sebelumnya hanya disampaikan melalui buku teks, jurnal akademik, atau diskusi seminar yang eksklusif. Salah satu contoh konkret dapat dilihat melalui kanal YouTube “Endgame” yang digagas oleh Gita Wirjawan, seorang mantan Menteri Perdagangan dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, yang kini aktif sebagai pembawa acara sekaligus inisiator diskusi intelektual bersama tokoh-tokoh nasional dan internasional. Kanal ini menjadi salah satu podcast dengan jangkauan audiens luas di Indonesia, terutama karena mengangkat isu-isu relevan dengan pendekatan yang reflektif, berbobot, namun tetap bisa dinikmati oleh kalangan non-akademisi. Salah satu episode yang menarik perhatian publik luas adalah episode ke-214 yang berjudul “Mahfud MD dan Kekecewaannya Terhadap Hukum.” Tayangan ini telah ditonton lebih dari 700 ribu kali dan menampilkan Prof. Mahfud MD sebagai tokoh sentral dalam diskusi yang mendalam mengenai persoalan hukum, ketidakadilan struktural, dan tantangan penegakan keadilan di Indonesia.

Dalam episode tersebut, Mahfud MD secara terbuka menyampaikan kekecewaannya terhadap praktik hukum yang sering kali tidak berjalan sesuai prinsip keadilan. Ia mengkritisi bagaimana hukum di Indonesia kadang dijadikan alat kepentingan politik dan ekonomi oleh kelompok-kelompok elite, serta adanya kecenderungan ketidakadilan sistemik dalam lembaga-lembaga penegak hukum. Dengan pendekatan komunikasi yang santai namun substantif, Mahfud MD menjelaskan bagaimana supremasi hukum bukan hanya persoalan aturan, tetapi menyangkut etika, keberanian politik, dan tanggung jawab moral semua elemen bangsa. Dalam diskusi ini, pendengar tidak hanya mendapatkan pengetahuan normatif seputar sistem hukum, tetapi juga diajak untuk berpikir kritis terhadap kenyataan yang terjadi di lapangan. Inilah yang menjadikan podcast sebagai instrumen literasi hukum: ia tidak sekadar menyampaikan informasi, melainkan juga membentuk kesadaran, membangkitkan refleksi, dan menumbuhkan sikap bertanggung jawab terhadap kondisi hukum di Indonesia.

Lebih dari itu, keberadaan podcast seperti Endgame membuka ruang pemahaman yang luas mengenai konsep bela negara dalam perspektif kontemporer. Nilai-nilai bela negara tidak lagi dipahami secara sempit dalam kerangka militeristik atau defensif terhadap ancaman fisik semata. Dalam era digital dan informasi, bela negara justru menuntut kontribusi intelektual dan partisipatif dari warga negara, terutama generasi muda, untuk memahami dan menjaga pilar-pilar konstitusi, hukum, serta keadilan sosial. Mahfud MD, dalam wawancaranya, memberikan contoh konkret bagaimana kecintaan terhadap tanah air dapat diwujudkan melalui kritik terhadap sistem hukum yang timpang, serta upaya menyuarkan keadilan melalui saluran yang bermartabat. Hal ini menunjukkan bahwa membela negara dapat dilakukan dengan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan integritas di ruang publik, termasuk melalui media digital seperti podcast. Transformasi digital membuat generasi muda berada pada posisi yang strategis dalam membentuk opini publik dan membela nilai-nilai konstitusional negara. Mereka tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi penyebar, pengolah, dan bahkan produsen konten hukum serta wacana kebangsaan. Akses yang luas terhadap internet memungkinkan mereka untuk mengakses episode podcast, menyebarkannya melalui media sosial, mendiskusikannya di ruang kelas atau forum daring, bahkan membuat konten tanggapan secara mandiri. Di sinilah proses pembelajaran dan partisipasi sipil berlangsung secara organik. Literasi digital dapat memperkuat ketahanan nasional jika diintegrasikan dengan penguatan kesadaran hukum dan kewarganegaraan dalam format yang mudah diakses dan relevan dengan kultur generasi saat ini.¹² Podcast sebagai media digital menjadi sarana yang memenuhi kebutuhan ini karena memiliki karakteristik dialogis, reflektif, dan edukatif sekaligus.

Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, podcast memberikan ruang untuk menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi dengan pendekatan yang lebih menarik dan relevan dibandingkan pendekatan konvensional. Generasi muda tidak hanya diajak untuk memahami

¹² Rasona Sunara Akbar, dkk., “Memperkuat Ketahanan Nasional: Aktualisasi Bela Negara Melalui Literasi Digital,” JPIPS, Vol. 16 No. 2, Desember 2024, hlm. 253–261.

hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial yang dinamis dan penuh tantangan. Diskusi-diskusi yang disajikan dalam format podcast memungkinkan peserta didik, mahasiswa, maupun masyarakat umum untuk mendengarkan langsung argumen, pengalaman, bahkan kritik dari tokoh-tokoh yang kompeten dan memiliki pengaruh nyata dalam pembentukan kebijakan publik. Hal ini menciptakan iklim pembelajaran yang kontekstual dan partisipatif. Media digital seperti podcast berperan aktif dalam membentuk kritik sosial yang berakar pada empati dan kesadaran kolektif atas isu keadilan dan kemanusiaan.¹³ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa podcast telah menjadi medium literasi hukum yang sangat potensial dalam konteks pendidikan kewarganegaraan dan penguatan nilai bela negara di era digital. Kehadirannya tidak hanya menggantikan peran media konvensional, tetapi juga menciptakan ruang baru yang lebih terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada pembentukan karakter kritis dan bertanggung jawab. Melalui pendekatan yang komunikatif dan substansial, podcast dapat menjembatani jurang antara wacana hukum akademik yang kerap eksklusif dan kebutuhan pemahaman publik yang inklusif. Dalam jangka panjang, penggunaan podcast sebagai media pembelajaran dan literasi hukum perlu terus didorong, baik melalui kebijakan pendidikan, inisiatif komunitas, maupun pengembangan kurikulum berbasis media digital. Dengan demikian, generasi muda Indonesia tidak hanya akan menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pelaku utama dalam membangun budaya hukum dan kebangsaan yang tangguh, kritis, dan berintegritas.

Tayangan Podcast Terkait Hukum Pada Kanal Youtube Gita Wirjawan Sebagai Media Literasi Hukum Untuk Generasi Muda Memahami Nilai-Nilai Bela Negara

Dengan semakin terbukanya ruang diskusi di media digital, partisipasi aktif generasi muda dalam memahami dan menyebarkan nilai-nilai hukum dan kebangsaan dapat menjadi bentuk nyata dari aktualisasi bela negara yang modern. Generasi milenial dan gen Z, yang sejak kecil telah akrab dengan gawai, media sosial, dan saluran digital lainnya, tidak lagi hanya menjadi konsumen informasi pasif, tetapi juga berperan sebagai penyebar, pengelola, dan bahkan produsen konten-konten yang sarat nilai kebangsaan dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, podcast muncul sebagai media yang ideal karena menghadirkan kombinasi antara kedalaman diskusi dan fleksibilitas akses. Pendekatan informal dalam penyampaian materi menjadikan podcast sebagai sarana yang inklusif dan adaptif terhadap cara belajar dan berinteraksi generasi muda. Oleh karena itu, literasi hukum melalui podcast bukanlah aktivitas pasif, melainkan sebuah gerakan ideologis dan edukatif yang secara langsung terhubung dengan pembentukan karakter kebangsaan berbasis digital. Generasi muda yang secara aktif menyimak, menafsirkan, dan menyebarkan konten-konten hukum dalam podcast, secara tidak langsung tengah menjalankan fungsi bela negara dalam bentuk yang paling relevan dengan tantangan zaman.

Podcast menjadi medium strategis yang tidak hanya menyampaikan informasi hukum, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga keutuhan nilai-nilai konstitusional bangsa. Dengan kontennya yang mudah dipahami dan seringkali menghadirkan tokoh-tokoh publik yang memiliki kredibilitas tinggi, podcast memberikan pendekatan yang lebih humanis dan dekat dengan realitas kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam podcast Endgame episode “Mahfud MD dan Kecewaannya Terhadap Hukum,” pernyataan Mahfud MD tidak hanya mencerminkan pengalaman pribadi sebagai pejabat negara, tetapi juga merepresentasikan kekecewaan kolektif terhadap sistem hukum yang kerap kali gagal menjalankan fungsinya sebagai penjaga keadilan. Dialog tersebut secara tidak langsung mengajak pendengarnya untuk berpikir kritis, memahami konteks, serta menilai kondisi hukum Indonesia secara lebih rasional dan objektif. Dalam kondisi seperti ini, podcast berfungsi sebagai ruang diskursif yang membuka peluang bagi terbangunnya partisipasi sipil berbasis kesadaran hukum dan kebangsaan.

Lebih lanjut, penggunaan podcast sebagai media edukatif dan reflektif menjadi signifikan ketika audiens yang dimaksud adalah generasi muda yang telah terbiasa berinteraksi dengan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Format podcast yang fleksibel memungkinkan pendengarnya untuk mengakses konten di mana pun dan kapan pun, bahkan saat melakukan aktivitas lain. Hal ini memperkuat argumen bahwa proses belajar dan internalisasi nilai kini tidak lagi terbatas pada ruang kelas formal. Berdasarkan refleksi subjektif penulis dan kelompok dalam menyimak tayangan podcast Endgame, diskusi antara Gita Wirjawan dan Mahfud MD memberikan dampak yang tidak hanya

¹³ Muhammad Wildan Wicaksono & Syafrida N.F., “Podcast Sebagai Media Kritik Sosial,” LIPI: Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol. 6 No. 1 (2023), hlm. 108–109.

informatif, tetapi juga transformatif dalam membentuk pemahaman terhadap prinsip-prinsip keadilan, supremasi hukum, dan tanggung jawab kewarganegaraan. Tayangan tersebut membuka kesadaran akan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawasi jalannya hukum dan kebijakan publik, sekaligus menumbuhkan keinginan untuk menjadi warga negara yang tidak hanya patuh, tetapi juga kritis dan partisipatif. Pola komunikasi yang dibangun dalam podcast ini bersifat dialogis, egaliter, dan partisipatif. Tidak ada jarak hierarkis antara narasumber dan audiens karena narasi disampaikan secara personal, akrab, dan dengan bahasa yang membumi. Hal ini memungkinkan terciptanya hubungan emosional dan intelektual antara pembicara dan pendengar. Dalam konteks literasi hukum, hal tersebut menjadi sangat penting karena hukum tidak hanya dipelajari sebagai sistem aturan, melainkan sebagai bagian dari pengalaman sosial yang melibatkan rasa keadilan, tanggung jawab, dan kesadaran kolektif. Oleh sebab itu, generasi muda tidak lagi diposisikan sebagai objek literasi hukum, tetapi juga sebagai subjek aktif yang mampu menafsirkan, menyebarkan, bahkan mengkritisi wacana hukum dalam ruang digital mereka sendiri. Transformasi ini merupakan indikasi bahwa digitalisasi bukan hanya membawa tantangan, tetapi juga peluang untuk memperluas cakupan pendidikan kewarganegaraan.

Fenomena ini selaras dengan hasil penelitian Hery Yuniarto yang menyebutkan bahwa generasi milenial lebih terpapar oleh media digital seperti podcast, media sosial, dan platform daring lainnya dibandingkan media konvensional. Mereka menghabiskan rata-rata satu hingga dua jam per hari untuk menyimak podcast dan tayangan edukatif di internet, yang dalam konteks bela negara dapat dimanfaatkan sebagai saluran untuk menumbuhkan kesadaran ideologis dan kepedulian hukum.¹⁴ Dengan demikian, partisipasi aktif mahasiswa dan generasi muda dalam menyimak dan mendiskusikan konten hukum dalam podcast merupakan salah satu bentuk nyata dari pendidikan kewarganegaraan digital. Proses ini menjadi bagian integral dari pembentukan identitas digital yang bertanggung jawab dan beretika, di mana mereka tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga agen perubahan sosial yang peka terhadap persoalan hukum, keadilan, dan integritas institusional.

Selanjutnya, dalam perspektif analisis wacana, podcast tidak hanya dapat menjadi media untuk menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk konstruksi realitas sosial-politik melalui pilihan kata, metafora, dan retorika yang digunakan.¹⁵ Dalam konteks episode podcast bersama Mahfud MD, pernyataan beliau dapat dipahami sebagai bentuk artikulasi dari kegelisahan kolektif terhadap kondisi hukum dan demokrasi yang sedang terpuruk. Hal ini menunjukkan bahwa media digital seperti podcast bukan hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga arena pertarungan makna di mana opini publik dibentuk dan disebarluaskan. Dalam dimensi wacana, podcast selalu memiliki tiga dimensi yang terdiri atas teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Ketiganya dapat ditemukan dalam tayangan podcast dimana teks sebagai struktur narasi dan bahasa, kognisi sosial sebagai interpretasi dari pembicara dan pendengar, serta konteks sosial sebagai kondisi dan dinamika masyarakat tempat wacana itu berkembang.¹⁶ Oleh karena itu, podcast dapat dilihat sebagai instrumen politik-kultural yang secara aktif membentuk kesadaran kolektif masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya integritas hukum, etika kekuasaan, dan keberlanjutan demokrasi. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa podcast saat ini telah menjadi platform komunikasi strategis yang memiliki peran penting dalam mentransformasi wacana hukum dan kebangsaan menjadi lebih inklusif, populis, dan mudah diterima oleh generasi muda yang hidup dalam ekosistem informasi yang dinamis. Sifatnya yang tidak formal, dialogis, dan mudah diakses menjadikan podcast sebagai alat pendidikan non-formal yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai konstitusional, moral, dan kebangsaan. Apalagi dalam konteks pendidikan karakter dan kewarganegaraan di era digital, di mana pelajar dan mahasiswa perlu dibekali dengan kemampuan berpikir kritis, memilah informasi, serta bertindak berdasarkan nilai-nilai keadilan dan etika publik. Maka dari itu, keberadaan podcast seperti *Endgame* maupun lainnya yang mengangkat isu hukum dan kebangsaan harus terus dikembangkan dan didukung, baik melalui kolaborasi institusi pendidikan, lembaga pemerintah, maupun komunitas sipil yang berfokus pada literasi digital dan advokasi publik.

SIMPULAN

¹⁴ Hery Yuniarto, "Analisis Peran Media Dalam Menumbuhkan Kesadaran Bela Negara Pada Generasi Milenial 4.0," J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 6, 2021, hlm. 1289–1290.

¹⁵ Helni Sadiyah, dkk., "Konstruksi Realitas Politik Hukum Indonesia dalam Podcast Bocor Alus Politik Tempo.Co," Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Vol. 21, No. 1, 2025, hlm. 177–193.

¹⁶ Teun A. van Dijk, *Discourse and Power*, Palgrave Macmillan, 2008.

Berdasarkan analisis tayangan podcast pada kanal YouTube Gita Wirjawan, dapat disimpulkan bahwa podcast bukan hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai media literasi hukum yang efektif dalam membangun kesadaran generasi muda terhadap nilai-nilai bela negara. Tayangan podcast yang memadukan narasi hukum, politik, dan kebangsaan disajikan dengan gaya komunikasi yang santai namun substansial, sehingga mampu menumbuhkan pemahaman kritis dan membangkitkan kepekaan sosial. Nilai-nilai bela negara dalam era digital tidak hanya ditunjukkan melalui loyalitas simbolik terhadap negara, tetapi juga melalui partisipasi aktif dalam diskusi publik, kemampuan berpikir kritis, serta keberanian untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan.

Dan juga khususnya bagi mahasiswa atau sivitas akademik, podcast yang ditayangkan oleh kanal Youtube Gita Wirjawan adalah sebagai salah satu sarana perolehan ilmu yang sangat baik sekali, tidak hanya Mahfud MD yang sebagai narasumbernya tetapi tayangan podcast yang dilakukan oleh bapak Gita Wirjawan, sangat direkomendasikan untuk didengar karena di dalam kanal Youtube tersebut menampilkan tayangan dari berbagai bidang tidak hanya hukum, politik atau kritik pemerintah saja tetapi dari bidang ekonomi dan bidang lainnya juga tersedia di dalam kanal Youtube tersebut yang dimana terdapat pakar atau ahli yang diundang di dalam tayangan podcast tersebut.

Rekomendasi bagi para pemangku kebijakan penyiaran di Indonesia adalah pentingnya mendukung produksi konten digital yang edukatif dan reflektif, khususnya yang berkaitan dengan literasi hukum dan kewarganegaraan. Bagi para konten kreator, penting untuk terus mengembangkan tayangan yang tidak hanya informatif, tetapi juga mendorong audiens untuk bersikap kritis, partisipatif, dan peduli terhadap isu-isu kebangsaan. Evaluasi terhadap kualitas dan keberlanjutan produksi konten digital perlu dilakukan agar literasi hukum di kalangan generasi muda semakin kuat, sehingga mereka mampu menjadi agen perubahan yang berintegritas dan berwawasan kebangsaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan proyek ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada teman-teman satu kelompok yang telah bekerja sama dengan penuh dedikasi dan semangat dalam penyelesaian artikel ilmiah ini. Tidak lupa, penulis juga menyampaikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyediaan data, referensi, serta motivasi yang mendukung kelancaran penyusunan artikel ini. Semoga hasil karya ini bermanfaat bagi pengembangan literasi hukum dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

REFERENSI

- Lindsey, T. (Ed.). (2008). *Indonesia, law and society* (2nd ed.). Federation Press.
- Tapsell, R. (2017). *Media power in Indonesia: Oligarchs, citizens and the digital revolution*. Rowman & Littlefield.
- Teun A. van Dijk. (2008). *Discourse and power*. Palgrave Macmillan.
- Hobbs, R. (2010). *Digital and media literacy: A plan of action*. The Aspen Institute.
- Adzani, D. M., & Jumino, J. (2020). Pemanfaatan Podcast dan Instagram Oleh Komunitas Literatif sebagai Media Penyebaran Informasi Bidang Perpustakaan. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 4(3), 327-342.
- Hadiz, V. R. (2004). Decentralisation and democracy in Indonesia: A critique of neo-institutionalist perspectives. *Development and Change*, 35(4), 697-718. <https://doi.org/10.1111/j.0012-155X.2004.00376.x>
- Helni Sadiyah, dkk. (2025). Konstruksi realitas politik hukum Indonesia dalam podcast Bocor Alus Politik Tempo.Co. *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 21(1), 177-193.
- Hery Yuniarto. (2021). Analisis peran media dalam menumbuhkan kesadaran bela negara pada generasi milenial 4.0. *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(6), 1289-1290.
- Lim, M. (2013). Many clicks but little sticks: Social media activism in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 43(4), 636-657. <https://doi.org/10.1080/00472336.2013.769386>
- Mayangsari, D., & Tiara, D. R. (2019). Podcast sebagai media pembelajaran di era milenial. *Jurnal Golden Age*, 3(02), 126-135.
- Muhammad Wildan Wicaksono & Syafrida N. F. (2023). Podcast sebagai media kritik sosial. *LIPi: Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 6(1), 108-109.

- Prasetya, A. (2020). Digital Learning dan Peran Podcast dalam Pembelajaran Hukum. *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, 21(2), 66–78.
- Rasona Sunara Akbar, dkk. (2024). Memperkuat ketahanan nasional: Aktualisasi bela negara melalui literasi digital. *JPIPS*, 16(2), 253–261.
- Siregar, F. M., & Suryani, A. (2023). Validasi konten pembelajaran digital berbasis podcast. *Jurnal Pendidikan Digital Indonesia*, 3(1), 12–22.
- Susanto, R., Handayani, D., & Farid, A. (2023). Podcast Politik dan Hukum sebagai Ruang Literasi Digital: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Media Digital Indonesia*, 5(1), 22–35.
- Swastiwi, A. W. (2024). *Globalisasi dan Media: Konvergensi Budaya dan Komunikasi*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.